



**LAPORAN KHUSUS**

## Petani Perkotaan Ditantang Godaan Zaman

*Mengelola lahan pertanian di wilayah perkotaan, bukan perkara mudah. Petani kota punya tantangan berat. Godaan menjual lahan selalu hadir lantaran harga tanah selalu naik. Belum lagi beban pajak bumi dan bangunan di Kota Yogya tergolong tinggi, sehingga cukup memberatkan petani.*

**MANGKU** Hadi Sasmito (69), petani warga RT 55 RW 14 Wirosaban, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, mengakui ada godaan menjual lahan miliknya tersebut. Namun demikian, Mangku berupaya mempertahankan lahan sawah seluas 7.500 meter persegi miliknya. Lahan itu sudah berkurang dibandingkan beberapa tahun lalu karena sebagian terpaksa dijual dan beralih fungsi. *\* Bersambung ke halaman 9*

**Petani** . . . . .

untuk bangunan rumah. Dia mengaku sebagian lahan sawahnya yang dijual di harga sekitar Rp 3 juta per meter.

"Kalau sawah sudah dekat dengan perumahan itu susah. Sebagian terpaksa saya jual. Jadi petani sekarang semakin susah. Hasilnya tipis, ongkos mengolah lahan tinggi karena mencari tenaga petani susah," kata Mangku saat berbincang dengan Merapi di pematang sawah miliknya, belum lama ini.

Mangku atau yang akrab disapa Mbah Mangku sampai kini masih mengelola sendiri sebagian lahannya yakni sekitar 1.600 meter persegi. Sedangkan sisanya dia kerja sama dengan petani penggarap karena usia yang membuat tenaganya semakin terbatas. Untuk tanam padi misalnya, ia mempekerjakan 8 orang. Setiap 1.000 meter persegi tanam, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 40 ribu per orang. Sedangkan anak-anaknya tidak ada yang menjadi petani.

"Di kota sawah kena hama itu risikonya kecil karena lahannya tidak luas dalam satu wilayah. Tapi harus rajin membersihkan saluran irigasi karena sampah dari aliran sungai. Bantuan benih atau pupuk tidak ada. Benih misalnya saat ada ujicoba benih," terang Mbah Mangku yang juga Ketua Kelompok Tani Manunggal, Wirosaban.

Sedangkan beban PBB sawah yang harus ditanggungnya tidak sedikit. Dia menyebut PBB yang harus dibayarkan untuk lahan sawah seluas 7.500 meter persegi sekitar Rp 8 juta pertahun. Kondisi itu dipengaruhi nilai jual objek pajak (NJOP) serta pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota yang terbilang tinggi. Bahkan tahun ini dia juga kegel

karena ada tagihan tunggakan PBB senilai Rp 40 juta.

Padahal setiap tahun ia membayar PBB rutin. Sebagian bukti pembayaran pajak PBB yang diminta, sudah tidak dimiliki karena di tahun 2006 kondisi gempa bumi.

"Saya belum bayar itu. Bagi petani nilai itu berat. Saya harap kantor pengelola pajak itu mengecek ulang kondisi di lapangan karena lahan di kota cepat berubah. Tapi nyatanya besaran pajak tiap tahun itu-itulah saja," ucap bapak empat anak dan tujuh cucu itu.

Menurut Mbah Mangku, selama ini tidak ada kebijakan keringanan pajak bagi petani di kota yang masih mengelola lahannya sendiri. Keringanan pajak pernah diberikan sekali di tahun 2011 dengan besaran penurunan PBB sekitar 40 persen. Tapi, tahun-tahun berikutnya PBB sawah naik kembali.

"Saat persमीan tempat penggilingan padi sekitar dua tahun lalu, pemerintah saat itu Pak Wali menjanjikan petani mau diberi keringanan pajak sawah. Tapi nyatanya sampai kini realisasinya tidak ada. Kami masih berharap ada keringanan pajak," papar Mbah Mangku yang pernah menerima penghargaan petani preprestasi dari Kementerian Pertanian dan Gubernur DIY.

Untuk menutup hasil pertanian yang tidak pasti itu kini dia mengandalkan pendapatan lain. Hasil lahan sawah yang dijual dulu itu sebagian untuk membangun kos-kosan di rumahnya, digunakan membeli sawah di wilayah Bantul. Dia memilih membeli lahan sawah lagi sebagai ganti sebagian sawahnya di Kota Yogya yang dijual.

Instansi

1. *Din. Pertanian & Pangan*
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

*etnal*  
*ta 60*

"Saya ambil jalan pintas bikin kos-kosan untuk nutup pendapatan yang kurang. Kalau cuma dari hasil pertanian sudah tidak bisa," ujarnya.

Dia mengaku akan terus mengelola sawah semampu dan sekuat tenaga yang dimiliki. Baginya lahan pertanian harus dipertahankan untuk masa depan anak cucu. Apalagi lahan pertanian itu juga turun temurun. Dia cukup sedih dengan pertanian di kota yang semakin susah. Kondisi itu dinilainya membuat generasi muda enggan bertani. "Saya ini petani teladan dan dapat penghargaan. Tapi tak ada anak saya yang mau jadi petani. Tapi saya tetap akan berusaha semampunya mengelola sawah," imbuh Mbah Mangku yang tidak tamat sekolah dasar itu.

#### Laboratorium Pertanian

Seiring alih fungsi areal pertanian menjadi permukiman, arah pertanian di Kota Yogya bukan lagi sebagai pertanian produksi pangan, namun bergeser pada laboratorium pertanian, untuk edukasi dan pengembangan bibit unggul.

Kelompok Tani Ngudirejo di Kelurahan Tegalrejo berhasil melakukan penangkaran benih padi yang kini sulit dicari, yakni padi Gogo Segreng. Ketua kelompok tani, Sugiyanto menuturkan, kegiatan penangkaran benih padi itu dilakukan petani di Tegalrejo bekerjasama dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSBP) di bawah Dinas Pertanian DIY sejak tahun 2014.

Sugiyanto menjelaskan, dalam menanam padi benih tertentu perlu memperhatikan kebutuhan air dan pupuk. Pada padi gogo varietas segreng cocok ditanam di daerah lahan kering. Pupuk

yang digunakan tidak banyak yakni cukup 75 kg/lahan 1 hektare. Beda dengan padi umumnya yang memerlukan pupuk sekitar 1 kuintal/lahan 1 hektare. Padi gogo varietas Segreng adalah varietas lokal daerah Gunungkidul yang sudah sulit dicari. Padi Segreng itu menghasilkan beras merah.

"Di Gunungkidul kualitas benih padi Segreng sudah tidak ada. Itu makanya mau dihidupkan lagi," paparnya.

Hasil penangkaran padi tersebut tidak bisa dijual bebas seperti ke tengkulak gabah atau beras. Dia menyampaikan hasil penangkaran padi itu akan dibeli BPSBP lalu dijual kepada penyedia benih padi atau toko-toko pertanian. Harga beli gabah untuk benih padi di petani mencapai Rp 4.800/kg. Beda dengan harga gabah untuk konsumsi beras yang di kisaran Rp 4.300/kg.

#### Makin Menyusut

Kepala Dinas Pertanian DIY Sasongko menyebut setiap tahun luas lahan sawah di DIY mengalami penyusutan atau berkurang sekitar 200 hektare. "Penyusutan lahan sawah rata-rata karena alih fungsi menjadi permukiman warga," kata Sasongko.

Berkurangnya lahan pertanian juga dinilai karena minat masyarakat, terutama anak muda menjadi petani minim. Sasongko menyatakan tenaga pertanian kini semakin berkurang. "Petani yang ada kini usianya sudah sepuh-sepuh," ujarnya. Dalam Perda DIY Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diatur lahan pertanian pangan berkelanjutan di DIY seluas 35.911,59 hektare.

(Tri/Son)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005